



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 79 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah BLUD yang selanjutnya disingkat SKPD BLUD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja yang selanjutnya disebut BLUD Unit Kerja, adalah Unit Kerja pada organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah pegawai negeri pada organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis, adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Tim Anggaran, adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA, adalah Rencana Kerja dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

19. Pendapatan, adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja, adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
21. Biaya, adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
22. Investasi, adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Basis Akrua, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Praktek Bisnis yang Sehat, adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Nilai Omset, adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
26. Nilai Aset, adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) BLUD wajib menetapkan Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD.
- (3) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.
- (3) RBA BLUD Unit Kerja disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD beserta RBA BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.

Pasal 6

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA SKPD BLUD dan RKA SKPD beserta RBA BLUD Unit Kerja.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pasal 9

- (1) DPA BLUD Unit Kerja disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD.
- (2) DPA SKPD BLUD dan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran.
- (3) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA BLUD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 11

Pendapatan BLUD bersumber dari :

- a. jasa layanan ;
- b. hibah ;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain ;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
- e. APBD ;
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain:
 1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan ;
 2. hasil pemanfaatan kekayaan ;
 3. jasa giro ;

4. pendapatan bunga ;
5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ;
6. pendapatan lain-lain.

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 13

- (1) Seluruh pendapatan BLUD SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dan disimpan oleh BLUD.

Pasal 14

Pendapatan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Biaya dan Belanja

Pasal 15

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi biaya BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi Biaya BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan, meliputi:
 1. Biaya pegawai ;
 2. Biaya bahan ;
 3. Biaya jasa pelayanan ;
 4. Biaya pemeliharaan ;
 5. Biaya barang dan jasa ;
 6. Biaya pelayanan lain-lain.
 - b. Biaya umum dan administrasi, meliputi :
 1. Biaya pegawai ;
 2. Biaya pemeliharaan ;
 3. Biaya barang dan jasa ;
 4. Biaya promosi ;
 5. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 17

- Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :
- a. Biaya bunga ;
 - b. Biaya administrasi bank ;
 - c. Biaya kerugian penjualan aset tetap ;
 - d. Biaya kerugian penurunan nilai ; dan
 - e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 18

Seluruh belanja BLUD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Seluruh belanja BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran belanja BLUD SKPD disusun dan disimpan oleh SKPD BLUD.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya BLUD Unit Kerja disusun oleh BLUD Unit Kerja dan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Seluruh belanja BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Pengusulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).
- (5) Seluruh belanja BLUD disahkan oleh PPKD dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) berdasarkan Surat Pengusulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang diusulkan oleh BLUD.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) BLUD dapat melakukan pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas BLUD SKPD setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari target pendapatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran ambang batas BLUD Unit Kerja ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari target pendapatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.
- (6) Pelampauan belanja melebihi ambang batas fleksibilitas harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 22

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan dan jenis belanja dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek belanja yang dilakukan oleh pemimpin SKPD BLUD dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pergeseran anggaran pada obyek belanjayang dilakukan oleh pemimpin BLUD Unit Kerja dan disahkan oleh Kepala SKPD yang menaungi BLUD Unit Kerja.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

Pasal 23

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;

- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
 - (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD atas nama BLUD pada Bank Umum Pemerintah.
 - (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Pengajuan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh BLUD Unit kerja melalui Kepala SKPD yang menaungi BLUD Unit Kerja terkait.
 - (6) Penerimaan BLUD disetor seluruhnya ke rekening BLUD paling lambat pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Kelima

Piutang

Pasal 25

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Utang

Pasal 26

- (1) BLUD berstatus penuh dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 27

- (1) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) BLUD Unit Kerja dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan utang.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

Pasal 28

- (1) Pembayaran kembali utang menjadi tanggungjawab BLUD.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh

Investasi

Pasal 29

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 30

- (1) BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) atas persetujuan Bupati.
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) BLUD Unit Kerja dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD.

Pasal 31

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 32

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi aset.

Pasal 33

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), antara lain :
 - a. kerjasama operasional ;
 - b. sewa menyewa ; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (5) Kerjasama yang dilaksanakan BLUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dilaporkan kepada Bupati, selain hal tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.
- (6) Kerjasama BLUD Unit Kerja atas persetujuan Kepala SKPD.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kesembilan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari :

- a. jasa layanan ;
- b. hibah tidak terikat ;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain ; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebelum Pemimpin BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pejabat pengadaan dan/atau panitia pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kesepuluh

Pengelolaan Barang

Pasal 39

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.

- (2) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 40

- (1) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) BLUD Unit Kerja dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.
- (6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Surplus Anggaran

Pasal 42

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 43

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Ketigabelas
Penatausahaan

Pasal 44

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya ;
- b. penerimaan/pengeluaran ;
- c. utang/piutang ;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi ; dan
- e. ekuitas.

Pasal 45

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan BLUD Unit Kerja ditetapkan atas persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 47

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 48

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 50

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (3) Laporan operasional dan laporan arus kas BLUD Unit Kerja disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

Pasal 52

- (1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan SKPD BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (3) Laporan keuangan BLUD Unit Kerja secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

BAB V

TARIF LAYANAN

Pasal 53

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Pasal 54

- (1) Tarif layanan SKPD BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tarif layanan BLUD ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD.
- (2) Standar Pelayanan Minimal SKPD BLUD diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati.
- (3) Standar Pelayanan Minimal BLUD Unit Kerja diusulkan oleh Pemimpin BLUD Unit Kerja dan diketahui Kepala SKPD kepada Bupati.

BAB VII
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 56

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas :
 - a. Pemimpin ;
 - b. Pejabat Keuangan ;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 57

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 58

- (1) Hak pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut :
 - a. mendapatkan gaji setiap bulan, dengan besaran sesuai Upah Minimum Kabupaten yang berlaku atau kemampuan keuangan BLUD ;
 - b. memperoleh cuti.
- (2) Pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS dapat diberikan tunjangan.

- (3) Kewajiban pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut :
- a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS ;
 - b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya ;
 - c. mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan golongan atau diri sendiri dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan Pemerintah Daerah ;
 - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum ;
 - e. melaksanakan tugas yang dibiayakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab ;
 - f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan ;
 - g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil ;
 - h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan ;
 - i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya ;
 - k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing ;
 - l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat ;
 - m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD ;
 - n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah ;
 - b. menyalahgunakan wewenang ;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain ;
 - d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain ;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah ;

- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah ;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;
- j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

Pasal 59

Pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau pegawai BLUD non PNS diselenggarakan oleh SKPD BLUD atau SKPD.
- (2) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sesuai dengan pemenuhan pegawai dari PNS, kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 61

- (1) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemimpin SKPD BLUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo ;
 - b. Kepala SKPD atas usulan BLUD Unit Kerja mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo ;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo melakukan analisis atas usulan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai ;
 - d. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.

- (2) Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD berdasarkan persetujuan Bupati, membentuk panitia pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS.
- (3) Tata cara pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut :
 - a. pengumuman melalui media massa dan/atau website Pemerintah Daerah ;
 - b. seleksi administrasi ;
 - c. pengumuman calon pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS yang lolos seleksi administrasi ;
 - d. ujian seleksi ;
 - e. pengumuman hasil ujian seleksi.

Pasal 62

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD dalam melaksanakan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS menetapkan persyaratan administrasi, materi ujian dan metode ujian seleksi.

Pasal 63

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berhenti atau diberhentikan oleh Pemimpin BLUD, apabila :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. berakhir masa kontrak ;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibiayai ; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

Pasal 64

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD melaporkan hasil pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.

- (2) Syarat minimal jumlah anggota Dewan Pengawas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Usulan Pemimpin BLUD untuk Dewan Pengawas pada BLUD Unit Kerja disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola ;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD ;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD ;
 - d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD ;
 - e. memberikan masukan, saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola ;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD ; dan
 - g. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 67

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur :

- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD ;
- b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 68

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan ;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan BLUD ;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD ; atau
 - e. berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 70

Segala Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibiayakan pada BLUD.

BAB IX

REMUNERASI

Pasal 71

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Remunerasi BLUD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD Unit Kerja dengan persetujuan Kepala SKPD.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Pembinaan teknis SKPD BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis BLUD Unit Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan Pengawas Internal Kabupaten Probolinggo.
- (4) Dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan dapat dibentuk tim pembina.

Pasal 73

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan pengawas internal BLUD.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal auditor.

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XI

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 75

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2015

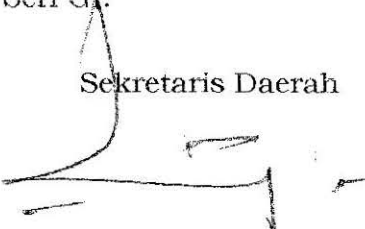
BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016
tanggal *4 Januari 2016* Nomor *79* Seri G.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1